

RINGKASAN

**Rosi Hani Asri
210501253**

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kampanye Hitam Melalui Media Sosial (Kajian Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum Dan Undang-Undang Informasi, Transaksi Elektronik)

(Dr. Elidar Sari, S.H., M.H dan Dr. Zul Akli, S.H., M.H)

Kegiatan pemilu tidak dapat dipisahkan dengan suatu kegiatan yang umumnya dikenal dengan istilah kampanye. Strategi dalam berkampanye selalu diiringi dengan munculnya fenomena kampanye hitam. Kampanye hitam merupakan salah satu bentuk kampanye yang terselubung dan pelakunya tidak memperlihatkan identitas dirinya dengan tujuan menjatuhkan lawan politik dengan cara menjelek-jelekkan agar buruk dimasyarakat. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku kampanye hitam melalui media sosial (kajian berdasarkan undang-yang berlaku di indonesia) dan untuk mengetahui kajian terhadap kendala dan solusi dalam penegakan hukum terhadap pelaku kampanye hitam melalui media sosial.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif yang berfokus pada kajian norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian adalah teknik penelitian yang berfokus pada studi kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian diketahui bahwa bentuk kampanye hitam di media sosial diantaranya penyebaran hoaks, video fitnah dan manipulatif, ujaran kebencian dan SARA, pencemaran nama baik. Pertanggungjawaban pelaku kampanye hitam diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dengan hukuman penjara 2 tahun atau denda Rp24.000.000,00. Namun, kendala dalam menjerat pelaku kampanye hitam melalui media sosial adalah pelaku menggunakan akun anonim sehingga tidak bisa teridentifikasi oleh penegak hukum.

Disaran kepada DPR RI dan pemerintah untuk dilakukan revisi Undang-Undang Pemilu terkait ketentuan pidana dalam tindak pidana kampanye hitam pada pemilu dengan menggunakan media sosial, guna menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Kata Kunci : Kampanye hitam, pertanggungjawaban Pidana, Media sosial

SUMMARY

**Rosi Hani Asri
210501253**

***Criminal Liability of Black Campaign Perpetrators
Through Social Media (Study Based on the General
Election Law and the Law on Information, Electronic
Transactions)***

**(Dr. Elidar Sari, S.H., M.H and Dr. Zul Akli, S.H.,
M.H)**

Election activities cannot be separated from an activity that is commonly known as a campaign. Strategies in campaigning are always accompanied by the emergence of the black campaign phenomenon. Black campaigns are a form of covert campaign and the perpetrators do not show their identity with the aim of bringing down political opponents by vilifying them so that they are bad in society. The purpose of this research in this thesis is to find out the criminal liability of black campaign perpetrators through social media (a study based on the applicable laws in Indonesia) and to find out a study of obstacles and solutions in law enforcement against black campaign perpetrators through social media.

The research method used is a type of normative juridical research that focuses on the study of legal norms, laws and regulations, and legal doctrines. The technique of collecting legal materials used in the research is a research technique that focuses on library research.

The results of the study found that the form of black campaigns on social media included the spread of hoaxes, defamatory and manipulative videos, hate speech and SARA, defamation. The accountability of black campaign perpetrators is regulated in law number 7 of 2017 concerning general elections with a prison sentence of 2 years or a fine of Rp24,000,000.00. However, the obstacle in ensnaring black campaign perpetrators through social media is that the perpetrators use anonymous accounts so that they cannot be identified by law enforcement.

It is recommended to legislators and the government to revise the Election Law related to criminal provisions in the crime of black campaigns in elections using social media, in order to adjust to other related laws and regulations.

Keywords: *Black campaign, Criminal liability, Social Media*